

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* memiliki akar psikologi dan sosiologi yang dibentuk untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo (2007). Raharjo (2007) juga menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Murwaningsih, 2009). Teori *stewardship* berdasarkan filosofis tentang sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Teori *stewardship* dapat diharapkan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principal*. Terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dengan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. organisasi sektor publik memiliki tujuan yang memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keterkaitan Teori *Stewardship* dengan penelitian ini adalah eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan tepat, membuat pertanggungjawaban anggaran yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah mengeluarkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Informasi keuangan dilihat dari kinerja keuangan pemerintah melalui anggaran pemerintah daerah. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.2 Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

2.2.1 Pengertian Kinerja Anggaran dan *Value For Money*

Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi misi, tujuan dan saran organisasi. Sederhananya kinerja yaitu “prestasi kerja”. Kinerja juga bisa dibidang sebagai hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang di dalam organisasi (Rudianto,2013). Anugriani (2014) anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi, definisi dari anggaran yaitu pernyataan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi sering merugi tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* yaitu inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan input, output, outcome yang berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan dan dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi artinya berdayaguna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang optimal,

serta efektif artinya berhasil dalam mencapai tujuan dan saran (Arifani, Salle, dan Rante, 2018).

2.2.2 Konsep *Value For Money*

Value for money adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang terdiri dari tiga elemen utama , yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

1. Ekonomi

Ekonomi yaitu perolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga rendah. Ekonomi merupakan perbandingan antar input dengan input value yang dinyatakan dengan satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan dengan sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output.

2.2.3 Manfaat *Value For Money*

Menurut Harryanto ddk (2007) dalam penelitian Sinaga (2017) menyebutkan bahwa manfaat dari *Value For Money* dalam organisasi sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam artian memberikan pelayanan yang tepat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang murah.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan *Public Cost Awareness* sebagai akar pelaksanaan.

2.2.4 Indikator Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018) beberapa indikator yang menjadi pengukuran kinerja anggaran berbasis *value for money* adalah sebagai berikut :

1. Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi).
 - Indikator ekonomi menggambarkan kehematan yang mencakup pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi ataupun menghilangkan biaya yang tidak perlu. Dengan kata lain, ekonomi merupakan pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*Spending Less*).
 - Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya staff, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending Well*).

2. Kualitas pelayanan (efektivitas).
 - Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*).

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas sangat terkait dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan atau saran kebijakan atau program.

Menurut Halim dan Ikbal (2012) dalam penelitian (Umami & Nurodin, 2017) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan tindakan dan kinerja dari seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam penelitian Arifani, Salle, dan Rante (2018) dikatakan bahwa aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas yaitu publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan sebuah instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil ataupun dampak semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan.

Menurut (Mardiasmo,2009) bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas hukum dari peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

2.3.2 Indikator Akuntabilitas

Beberapa indikator yang menjadi pengukuran akuntabilitas sebagai berikut :

1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan.
2. Kepatuhan terhadap hukum.
3. Proses dan pertanggungjawaban anggaran
4. Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya.
5. Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal biaya minimal.
6. Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

2.4 Transparansi

2.4.1 Pengertian Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Transparansi yaitu wujud dari pemberian informasi keuangan dan jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan tanpa ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya praktik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

1. Salah satu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Transparansi bermakna ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat, serta mencegah akan terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak langsung (Arifani, Salle, dan Rante , 2018).

2.4.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menyatakan ada 6 prinsip transparansi sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dimengerti dan diakses.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.4.3 Indikator Transparansi

Dalam penelitian Anugriani (2014) beberapa indikator yang menjadi pengukuran transparansi sebagai berikut :

1. Sistem keterbukaan kebijakan anggaran.
2. Dokumen anggaran mudah diakses.
3. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara rakyat.
5. Sistem pemberian informasi kepada publik.

2.5 Pengawasan

2.5.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk mengamati, memahami, dan juga menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah ataupun diperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan kegiatan, aparatur pengawasan mengamati dan menilai apakah aktivitas yang direncanakan dilaksanakan dengan baik (Siregar,2015). Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pratuvaliandry (2005) menyatakan bahwa tujuan pengawasan pada dasarnya yaitu untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan bisa segera dikenali agar dapat diambil tindakan solusi atau koreksi. Melalui tindakan ini, maka pelaksanaan kegiatan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal.

2.5.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Baswir (1999) jenis-jenis pengawasan dibedakan berdasarkan obyek, sifat, ruang lingkup dan berdasarkan metode pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan berdasarkan obyek
 - a. Pengawasan terhadap penerimaan negara, yakni pengawasan terhadap seluruh bentuk penerimaan negara seperti penerimaan pajak dan bea cukai serta penerimaan bukan pajak.
 - b. Pengawasan terhadap pengeluaran negara, yakni pengawasan terhadap bentuk pengeluaran negara seperti belanja rutin dan belanja pembangunan.

2. Pengawasan berdasarkan sifat
 - a. Pengawasan Preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum mulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pengawasan Detektif, yakni pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban untuk membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.
3. Pengawasan berdasarkan ruang lingkup
 - a. Pengawasan Internal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari lingkungan internal organisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan verifikasi dan membantu pihak yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. Pengawasan Eksternal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan dari luar lingkungan organisasi.
4. Pengawasan berdasarkan metode pengawasan
 - a. Pengawasan Melekat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung suatu unit organisasi terhadap pegawainya dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pengawasan Fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi.

2.5.3 Indikator Pengawasan

Sinaga (2017) beberapa indikator yang menjadi pengukuran pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*) Pengawasan.

Input pengawasan ialah segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

2. Proses Pengawasan.

Proses pengawasan ialah tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

3. Pengeluaran (*Output*) Pengawasan.

Output pengawasan ialah sesuatu yang diharapkan dapat dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya.

2.6 Partisipasi Anggaran

2.6.1 Pengertian Partisipasi Anggaran

Kinerja pemerintah daerah sangat erat hubungannya dengan partisipasi anggaran dikarenakan kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari seberapa keterlibatannya dalam proses penyusunan anggaran, selain itu pemerintah daerah juga diberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan (Triseptya et al., 2017). Safitri (2019) Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk melahirkan sistem pengendalian manajemen yang baik dan diharapkan dapat mencapai tujuan instansi yang terkait. Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan juga dapat menunjang kinerja dari suatu instansi pemerintah serta menjadi sarana akuntansi terbaik untuk setiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu pendekatan anggaran yang memungkinkan manajer tingkat bawah untuk ikut serta dalam mengembangkan anggaran. Partisipasi anggaran juga mengomunikasikan rasa bertanggung jawab untuk manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Partisipasi adalah salah satu unsur yang penting untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak.

Perwujudan partisipasi merupakan suatu tindakan yang ikut melibatkan seseorang secara langsung dan memiliki pengaruh dalam proses penyusunan anggaran yang dikerjakannya akan diapresiasi atas pencapaian tujuan anggaran. Pengaruh dan andil seseorang ikut serta dalam proses penganggaran merupakan wujud partisipasi seseorang dalam sisi psikologis (Brownell,1980).

2.6.2 Indikator Partisipasi Anggaran

Menurut Safitri (2019) ada beberapa indikator yang menjadi pengukuran partisipasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran.
2. Pengaruh dalam penyusunan anggaran.
3. Komitmen dalam penyusunan anggaran.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar saat melakukan suatu penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas atau memperdalam teori yang akan dipaki dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai tolak ukur peneliti dalam menulis dan menganalisa suatu penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Latifah Sinaga (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Batu Bara	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money	- Secara simultan, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> - Secara parsial, Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> sedangkan Transparansi dan Pengawasan

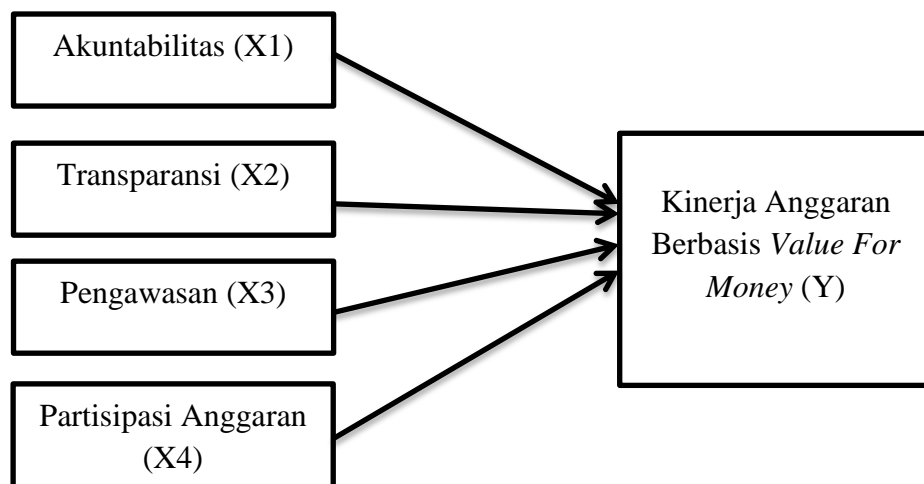
				berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value For Money</i>
2.	Ni Luh Putu Uttari Premana nda dan Ni Made Yenni Latrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Variabel Dependen : Kinerja Anggaran	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran
3.	Budi S Purnomo dan Cahaya Putri (2018)	Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>

			<i>Money</i>	
4.	Cindy Arifani, Dr. Agustinus Salle, S.E., M.Ec, dan Andika Rante, S.E., m.SA (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura)	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	- Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value For Money - Transparansi dan Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value For Money
5.	Dahlia Dwi Safitri (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran Variabel Dependen : Kinerja Anggaran	Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran

6.	Victorinus Laoli (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Nias	Variabel Independen : Akuntabilitas dan Transparansi Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> sedangkan Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> - Secara simultan Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>
7.	Zakaria	Pengaruh	Variabel	Akuntabilitas,

	Batubara dan Ria Risna (2020)	Akuntabilitas, Partisipasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Independen : Akuntabilitas, Partisipasi, dan Pengawasan Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	Partisipasi, dan Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>
--	-------------------------------	--	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Safitri (2019) tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah menekankan terhadap pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Jadi Pemerintah Kabupaten Pesawaran wajib meningkatkan prinsip pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja anggaran agar dapat menjadikan pemerintah kabupaten Pesawaran menjadi lebih baik lagi. Akuntabilitas bukan cuma kemampuan memperlihatkan bagaimana uang publik itu dibelanjakan tetapi kemampuan memperlihatkan bahwa publik itu sudah dibelanjakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik (Umami & Nurodin, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Rigian dan Sari (2019) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*. Begitu juga dengan hasil penelitian Sinaga (2017) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*

2.9.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*

Sabarno (2010) transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan indikator lainnya. Transparansi yaitu memberikan informasi terbuka baik informasi tentang keuangan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi semua orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Umami & Nurodin, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Arifani, Salle, dan Rante (2018) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*. Begitu juga dengan hasil penelitian Sinaga (2017) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* yang menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

Berdasarkan uraian diatas,dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*

2.9.3 Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk mengamati, memahami, dan juga menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah ataupun diperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang

direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan kegiatan, aparatur pengawasan mengamati dan menilai apakah aktivitas yang direncanakan dilaksanakan dengan baik (Siregar,2015). Pengawasan pada dasarnya yaitu untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan bisa segera dikenali agar dapat diambil tindakan solusi atau koreksi. Melalui tindakan ini, maka pelaksanaan kegiatan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvaliandry,2005).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*. Begitu juga dengan hasil penelitian Safitri (2019) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran yang menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

2.9.4 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*

Safitri (2019) Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk melahirkan sistem pengendalian manajemen yang baik dan diharapkan dapat mencapai tujuan instansi yang terkait. Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu pendekatan anggaran yang memungkinkan manajer tingkat bawah untuk ikut serta dalam mengembangkan anggaran. Partisipasi adalah salah satu unsur yang penting untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan terlibatnya langsung dalam penyusunan anggaran, para pegawai pemerintahan

mendapatkan kesempatan untuk mereka untuk mengeksplor kemampuannya dalam menentukan tujuan dan sasaran yang tergambar dalam anggaran. Kepala atau pegawai dalam suatu unit organisasi/divisi adalah orang yang mempunyai informasi yang memadai tentang unit/divisi di mana tempat mereka bekerja. Melibatkan mereka dalam penyusunan anggaran berarti menyusun anggaran dengan sumber informasi yang relevan. Hal ini akan menghasilkan anggaran dengan tingkat pencapaian yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian Rigian dan Sari (2019) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* menunjukkan bahwa Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*. Begitu juga dengan hasil penelitian Safitri (2019) yang menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran yang menunjukkan bahwa Partisipasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money*